

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hubungan Internasional adalah ilmu yang dapat didefinisikan sebagai studi tentang hubungan dan interaksi antar negara, termasuk kegiatan dan kebijakan pemerintah nasional, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional dapat berupa subyek teoritis dan praktis atau subyek kebijakan, dan pendekatan akademis yang dapat berupa subyek empiris atau normatif atau keduanya. Hubungan internasional sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi juga merupakan subyek yang mencakup banyak hal seperti ekonomi internasional, hukum internasional, dan masih banyak lagi. Aspek-aspek yang mencakup tentang hubungan internasional, khususnya perang dan diplomasi, telah diteliti dan dikomentari setidaknya sejak zaman sejarawan Yunani kuno Thucydides, tetapi hubungan internasional hanya menjadi disiplin akademis yang tepat pada awal abad kedua puluh (Jackson & Sorensen, 2005 : 4).

Hubungan Internasional yang mencakup hal tentang interaksi antar Negara-negara tentunya dibutuhkan oleh setiap Negara, seperti pemenuhan kebutuhan suatu Negara, salah satunya dengan melakukan sebuah interaksi yang disebut kerjasama internasional. Hubungan antar Negara yang berupa kerjasama internasional merupakan Hubungan Luar Negeri sebagai interaksi antara dua atau lebih negara yang diwakili untuk melakukan diplomasi, peningkatan ekonomi dan

penguatan keamanan dalam mengejar tujuan terciptanya kepentingan bersama (Perwita & Yani, 2005 : 33).

Banyaknya sebuah fenomena dan dimensi dalam hubungan internasional seperti era kemajuan globalisasi yang terdapat sebuah fenomena negatif seperti timbulnya suatu kejahatan lintas Negara. Gerakan para ekstrimis dan teroris di perbatasan perbatasan antar negara, merupakan hal yang sangat berbahaya bagi Negara yang dapat mengancam kedaulatan Negara, maka kerja sama merupakan hal yang penting dalam mengatasi ancaman kejahatan dan pembajakan di kawasan perbatasan. Kejahatan lintas Negara dewasa ini telah menjadi suatu ancaman atau masalah baru bagi keamanan di suatu Negara dan bisa menimbulkan konflik antara Negara-negara yang bersangkutan, dan di satu sisi juga bisnis kejahatan transnasional juga menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan bagi para penjahat.

Perairan di kawasan Asia tenggara, khususnya kawasan selat malaka merupakan kawasan perairan yang berbahaya bagi pelaku bisnis internasional, karena kawasan ini merupakan kawasan yang berbahaya mengingat banyaknya kasus yang terjadi seperti kejahatan pembajakan dan perampokan bersenjata, oleh karena itu data dari *The International Chamber of Commerce* (ICC) dan *International Maritime Bureau* (IMB) yang menyebut Asia Tenggara sebagai salah satu pusat perompakan kapal paling parah di dunia ([https://www.vice.com/id\\_id/article/bmdv58/selat-malaka-dan-laut-sulu-jadi-zona-perompakan-paling-berbahaya-bagi-indonesia](https://www.vice.com/id_id/article/bmdv58/selat-malaka-dan-laut-sulu-jadi-zona-perompakan-paling-berbahaya-bagi-indonesia), diakses pada tanggal 7 Maret 2019).

Sebelumnya, selat malaka merupakan jalur yang dianggap paling berbahaya di Asia tenggara, tetapi semenjak tahun 2014, laut sulu juga dianggap berbahaya karena banyaknya kejahatan dan perampokan yang terjadi di wilayah laut Sulu. Laut Sulu merupakan rute perdagangan maritim yang penting bagi kerjasama kawasan. Tetapi daerah itu juga menjadi terkenal sebagai titik hitam pembajakan dan perampokan bersenjata di laut. Kejahatan yang meningkat semenjak tahun 2014 yang disebabkan oleh tindakan kejahatan kelompok teroris Abu Sayyaf Group (ASG) telah melakukan serangkaian kejahatan seperti kekerasan, perampokan dan penculikan terhadap pelaku bisnis yang melewati laut sulu (<https://www.bbc.com/news/world-asia-39252503>, diakses pada tanggal 7 Maret 2019).

Laut Sulu dan laut Sulawesi adalah perairan besar di bagian timur Asia Tenggara. Laut Sulu dibatasi di barat laut oleh pulau Palawan di Filipina, di sebelah tenggara oleh kepulauan Sulu yang terdiri dari pulau Basilan, Jolo dan Tawi-Tawi dan di barat daya oleh negara bagian Sabah, Malaysia timur. Laut Sulawesi berbatasan dengan kepulauan Sulu dan Mindanao di utara, Sabah dan provinsi Kalimantan di sebelah barat, dan Sulawesi di selatan.

Pentingnya laut Sulu - Sulawesi bagi kerjasama kawasan merupakan hal yang harus lebih diperhatikan oleh Negara-negara di kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah laut tersebut, karena berdasarkan data setiap tahunnya ada kurang lebih dari 50 juta metric ton barang dan ada lebih dari 15 juta pelaku bisnis yang melintasi perairan di laut Sulu – Sulawesi

(<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Pertemuan-Trilateral-Tiga-Negara-Bahas-Tantangan-Bersama-di-Perairan.aspx>, diakses pada tanggal 7 Maret 2019).

Secara letak geografis, Indonesia merupakan Negara yang memiliki wilayah perbatasan yang strategis dengan Negara-negara tetangga antara Indonesia – Malaysia dan Filipina, yang perbatasan tersebut merupakan wilayah alur laut kepulauan indonesia (ALKI ) nomor II, jalur pada ALKI II yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya. Jalur laut ALKI II berada pada sekitaran kepulauan laut sulu, yaitu pulau pulau seperti pulau Tawi-Tawi, pulau Basilan dan pulau Jolo yang dimana kepulauan tersebut merupakan basis dari kelompok perompak, yaitu kelompok teroris Abu Sayyaf (<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/413-menilik-alur-laut-kepulauan-indonesia-ii>, diakses pada tanggal 9 maret 2019).

Tingkat kejahatan di laut Sulu Pada awal 2016, banyak kasus kejahatan penculikan dan perampokan yang dilakukan demi meminta tebusan pada warga Negara yang di culik, yang dimana Negara harus memfokuskan kembali perhatian pada masalah pengawasan keamanan maritim di daerah tersebut. Pada bulan Maret dan April, para penjahat yang mengatasnamakan Abu Sayyaf Grup (ASG) yang bersenjata menyerang tiga kapal, dan menculik 18 kru kapal tersebut. Karena kru kapal yang diculik tersebut merupakan sebagian besar warga Indonesia, pihak pemerintah Indonesia menginiasi dan mengajak dalam menyerukan kerja sama keamanan yang terkoordinasi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk mengatasi masalah tersebut.

Tingkat kejahatan yang terjadi khususnya di daerah laut Sulu merupakan sebuah ancaman yang nyata bagi ketiga Negara yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Sulu dan wilayah ini berpotensi menjadi markas bagi pelaku penjahat internasional. Teroris yang mengancam di wilayah laut Sulu ini yaitu Abu Sayyaf Grup dan ISIS merupakan pelaku kriminalitas yang harus segera diatasi karena kelompok tersebut berpotensi besar dapat mengganggu keamanan regional khususnya di kawasan Asia tenggara. Ketiga Negara yang terlibat langsung yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina menginisiasi pembentukan patroli angkatan laut yang terkoordinasi di Laut Sulu - Sulawesi yang mencontoh dari keberhasilan Patroli Selat Malaka / *Malacca Straits Patrol* (MSP) yang telah dilakukan oleh angkatan bersenjata oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand yang dilakukan di jalur air yang strategis (<http://maritimnews.com/2016/05/kerjasamatriateralidiperairansuluulangikeberhasilan-di-selat-malaka/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2019).

Dalam peristiwa kejahatan ini, tentunya diperlukan sebuah aksi nyata yang harus dilakukan oleh Negara-negara perbatasan langsung yang harus bertanggung jawab seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam meningkatkan keamanan dikawasan. Perlunya sebuah kerjasama dalam menanggulangi sebuah aksi kejahatan lintas Negara yang dilakukan oleh perompak, teroris seperti kelompok Abu Sayyaf dan kelompok ISIS. Gangguan atau ancaman yang terjadi di wilayah Sulu – Sulawesi yang otomatis akan berdampak buruk bagi Negara-negara yang berbatasan langsung harus dapat diatasi secara cepat dan tepat.

Para penjahat seperti teroris dan perompak yang ada di wilayah Sulu – Sulawesi yang menghambat produktifitas dan tentunya menyebabkan kerugian, yang kerugian tersebut adalah kerugian bersama antar Negara yang terlibat. Oleh karena itu diperlukan sebuah pergerakan yang tepat dan kerjasama antar Negara yang pastinya dapat menjadikan wilayah maritim di perbatasan antar Negara Indonesia, Malaysia dan Filipina dapat terjaga keamanannya.

Berdasarkan data yang dikutip di *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) Information Sharing Center*, data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 merupakan tahun yang dimana tingkat kejahatannya cukup tinggi karena ada 10 serangan langsung dan 6 percobaan kejahatan yang terjadi di Laut Sulu - Sulawesi. Kejahatan di perairan ini tentunya sangat berpotensi membahayakan keselamatan para pengguna laut, karena dari tahun 2016 sampai tahun 2018 ada 13 serangan langsung kejahatan yang dilakukan di perairan tersebut, dan korban dari kejahatan di perairan tersebut mencapai 61 orang, yang dimana 28 korban telah dibebaskan karena telah adanya tebusan, 17 korban telah diselamatkan dan 7 korban tewas dan 9 korban masih dalam kondisi di tahan di penangkaran korban (<https://criticalmaritimeroutes.eu/2019/02/01/2018-recaap-isc-annual-report-piracy-and-armed-robbery-at-sea-declining-in-asia/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2019).

Angka kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di perairan itu secara tidak langsung memaksa tiga Negara di perbatasan yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk meningkatkan kerja sama keamanan di daerah perbatasan

khususnya di laut Sulu – Sulawesi yang terkena dampak dari kejahatan yang terjadi. Tentunya hal yang menjadi perhatian yaitu pada Juni 2017, setelah 13 bulan melakukan diskusi diantara ketiga Negara yang terlibat langsung, ketiga negara meluncurkan program *Trilateral Maritime Patrols* (TMP), yang diawali dari adanya sebuah *Joint Declaration* diantara ketiga Negara yang disepakati pada tanggal 5 Mei 2016 di Yogyakarta. Dari *Joint Declaration* tersebut yang telah disepakati oleh ketiga Negara, yang dimana hal itu menjadi sebuah acuan dari kerjasama antara ketiga Negara dalam mewujudkan sebuah kerjasama yang lebih lengkap dan serius melalui pertemuan di Manila, tanggal 20 Juni 2016 yang menghasilkan sebuah *Joint Statement* yang menjadi sebuah acuan implementasi kerjasama yang akan dilakukan oleh ketiga Negara tersebut (<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Joint-Declaration-Foreign-Ministers-and-Chiefs-of-Defence-Forces-of-Indonesia-Malaysia-Philippines.aspx>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019).

Kepentingan yang mendasari masing – masing Negara melaksanakan kerjasama ini yaitu seperti Negara Indonesia yang memiliki kepentingan dalam menjaga wilayahnya dari ancaman teroris karena banyaknya warga Negara Indonesia yang diculik oleh para perompak di wilayah sulu – Sulawesi. Kepentingan Malaysia dalam kerjasama ini yaitu di wilayah sekitar Sabah banyak terjadi kasus perompakan yang di sebabkan oleh kelompok terorisme dan perompak. Kepentingan Filipina dalam kerjasama ini yaitu karena Filipina merupakan Negara yang menjadi penyebab banyaknya kasus terorisme karena terorisme dan tokoh perompak tersebut berasal dari Filipina dan Filipina ingin

menyingkirkan kelompok perompak dan terorisme tersebut dengan melakukan kerjasama yang terkoordinasi diantara Negara disekitarnya.

Isi dari kerjasama *Joint Statement* yang telah disepakati diantaranya adalah melakukan kegiatan yang terkoordinasi di antara militer dari tiga negara, dengan fokus pada keamanan maritim, membangun pos komando militer bersama di lokasi yang ditunjuk termasuk penghubung militer di atas kapal masing-masing negara, kawasan maritim dan udara menjadi perhatian bersama, dibentuknya kelompok Kerja Patroli Maritim Trilateral yang akan menetapkan arahan operasional pada pelaksanaan patroli maritim trilateral, pusat komando maritim akan didirikan oleh masing-masing negara dan akan memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk penugasan masing-masing, Koridor transit di wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama yang akan berfungsi sebagai jalur laut yang ditunjuk untuk pelaut yang memasuki wilayah laut di daerah perbatasan, dan berbagi informasi yang berkaitan dengan keamanan maritim (Department of National Defense Republic Of Philippines. 2016. diakses pada tanggal 2 April 2019)

Program Kerjasama trilateral ini merupakan sebuah reaksi dari masing – masing Negara yang salah satunya disebabkan oleh adanya konflik yang terjadi di Marawi, wilayah Filipina yang terjadi sebelum diresmikannya program kerjasama *Trilateral Maritime Patrol indomalphi* ini. Konflik antara pemerintah Filipina dengan kelompok teroris Abu Sayyaf di Marawi yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2017 yang menjadi perhatian dunia pada saat itu menjadikan Negara – Negara di perbatasan yang berbatasan langsung dengan wilayah Filipina memandang bahwa



diperlukannya sebuah kerjasama yang konkret dalam menghadang gerakan terorisme yang terjadi di perbatasan, karena kejahatan terorisme tentunya berpotensi mengancam kedaulatan di sebuah Negara.

*Trilateral Maritime Patrol indomalphi* merupakan program yang lahir dari sebuah tindak lanjut kerjasama yang telah dilakukan melalui *Joint Declaration* dan *Joint Statement* dari ketiga Negara yang terlibat. Terbentuknya Program ini merupakan sebuah bentuk urgensi karena tingginya tingkat kejahatan di kawasan regional yang pada saat itu Filipina merupakan kawasan yang terafiliasi kelompok ISIS, Abu Sayyaf Grup (ASG) dan penjahat perompak lain yang memberikan dampak buruk bagi kawasan regional ASEAN. Menghadapi ancaman tersebut, ketiga Negara yang bekerja sama melakukan kegiatan seperti pertukaran informasi, melakukan patroli di wilayah perbatasan masing – masing Negara.

Adanya program kerjasama ini juga merupakan sebuah aksi dalam menghadang gerakan terorisme menyebar dari satu wilayah ke wilayah yang lain, seperti masuknya pengaruh kelompok radikal ISIS di Filipina ke wilayah Indonesia dan Malaysia. Program kerjasama ini adalah sebuah bentuk waspada dari pihak Negara – Negara yang terlibat dalam menghadang terorisme masuk kedalam wilayah kedaulatan Negara. Banyaknya kelompok radikal yang terafiliasi dengan ISIS seperti kelompok Abu Sayyaf Grup, dan kelompok lain yang berada di masing – masing Negara yang terlibat diperkirakan berjumlah 63 kelompok. Kelompok yang terafiliasi oleh ISIS tersebut tersebar di Indonesia sebesar 29 kelompok, 22 kelompok di Filipina dan 12 kelompok di Malaysia yang tentunya dapat berpotensi mengancam sebuah kedaulatan Negara

(<http://kaltara.prokal.co/read/news/12143-63-kelompok-diwaspadai-tiga-negara.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019).

Peresmian program *Trilateral Maritime Patrol indomalphi* pada tanggal 19 Juni 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara membuktikan bahwa ketiga Negara benar-benar serius dalam menghadapi ancaman keamanan dikawasan maritim dalam pencegahan kejahatan di perbatasan masing-masing Negara, seperti kejahatan non tradisional yaitu perampokan, penculikan dan kejahatan lintas batas Negara di kawasan maritim. Dalam kesepakatan yang telah terjalin diantara ketiga Negara tersebut juga di implementasikan dengan dibuatnya sebuah *Command Center* yang berada di masing – masing wilayah Negara seperti milik Indonesia berada di Tarakan, *Command Center* Filipina berada di Bongao dan *Command Center* Malaysia berada di Tawau (<https://www.kodam-mulawarman.mil.id/web/trilateral-maritime-patrol-indomalphi-resmi-dimulai/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2019).

Dalam mendukung keberhasilan dalam kerjasama ini diluncurkan sebuah patrol trilateral di udara untuk mendukung program Trilateral Maritim Patrol yang diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2017 yang berupa patroli rotasi bulanan, yang dimana Malaysia bertugas memimpin operasi pada Bulan November, dan diikuti oleh Filipina pada bulan Desember, dan Indonesia memimpin pada Bulan Januari, dan seterusnya. Program ini terinspirasi dari program yang sebelumnya di lakukan di selat malaka dalam mengawasi tindak kejahatan transnasional, program ini juga membantu Satgas Trilateral Maritim Indomalphi dalam menjaga

wilayah perbatasan yang terancam dengan kehadiran perompak dan teroris di perbatasan.

Kekuatan yang dikerahkan Negara yang terlibat kerjasama seperti kapal perang dari Malaysia KD-Baung-3509 dari Indonesia yaitu kapal perang berjenis KRI-Sidat-851 dan kapal perang dari Filipina yaitu berjenis BRP General Mariano Alvarez dan pada tahap peluncuran melibatkan sebanyak 126 personel dari masing – masing Negara dan melibatkan TNI Angkatan Laut, Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan *Philliphine Navy* (PN) dalam mewujudkan keamanan di perbatasan masing – masing Negara.

Kerjasama ini tentunya menjadi sebuah awal untuk meningkatkan sebuah hubungan antar Negara dan keamanan masing – masing Negara yang terlibat. Meningkatkan sebuah kerjasama dari segi kualitas dan kuantitas dari tingkat kerjasama tersebut di bidang pertahanan dan kedaulatan Negara yang sama-sama bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah ketiga Negara tersebut.

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tujuan dari dibentuknya program kerjasama Trilateral Maritim Patrol, dukungan pengembangan kapasitas kekuatan yang diberikan oleh kerjasama regional, dan bagaimana ketiga negara bekerja sama secara individual maupun kolektif dalam meningkatkan keamanan maritim di Laut Sulu – Sulawesi.

Untuk melengkapi latar belakang yang telah disusun oleh peneliti, ada *previous study* yang akan peneliti jabarkan yang terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina terkait menjaga kermanan

kawasan maritim. Penelitian mengenai kerjasama Trilatetral dalam meningkatkan keamanan kawasan di maritim adalah karya ilmiah berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Dinar Rizky Muliatama tentang masalah yang diambil yaitu Kerjasama Trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam Mengatasi Keamanan Maritim (Studi Kasus: Abu Sayyaf Grup) di Universitas Al-Azhar Indonesia. Peneliti meneliti tentang kerjasama Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam mengatasi keamanan maritim di perbatasan ketiga Negara khususnya di laut Sulu yang merupakan tempat terjadinya kejahatan transnasional. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama membahas tentang kerjasama dalam meningkatkan keamanan maritim di kawasan dan memfokuskan kerjasama yang dilakukan antar Negara. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada perbedaan fokus waktu penelitian yang penelitian ini memfokuskan pada kejadian di tahun 2014-2016 peneliti akan mencoba memperbarui studi kasus yang terjadi di sepanjang tahun 2016-2018 terkait tentang kerjasama Trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam meningkatkan keamanan maritim di perbatasan laut sulu - sulawesi dan perbedaan lain, peneliti sebelumnya lebih memfokuskan pada profil dari kasus Abu Sayyaf Group.

Penelitian yang lain mengenai kerjasama Trilateral dalam meningkatkan keamanan kawasan di maritim adalah karya ilmiah berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Zhafirah Yanda Masya tentang masalah yang diambil yaitu Analisis Kerjasama keamanan Trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina di Laut Sulu – Sulawesi tahun 2016-2017 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama membahas

tentang kerjasama dalam meningkatkan keamanan maritim di kawasan yang dilakukan antar Negara. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada perbedaan fokus waktu penelitian yang penelitian ini memfokuskan pada kejadian di tahun 2016-2017 dan peneliti akan mencoba memperbarui studi kasus yang terjadi di sepanjang tahun 2016-2018 terkait tentang kerjasama Trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam meningkatkan keamanan maritim di perbatasan laut Sulu – Sulawesi.

Penelitian yang lain mengenai kerjasama Trilateral dalam pengelolaan sumber daya alam adalah karya ilmiah berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Prilia Ariesta Datuarrang tentang masalah yang diambil yaitu Kerjasama Trilateral (Indonesia, Malaysia, Filipina) Melalui Program, Ecoregion Conservation Plan (ECP) Di Laut Sulu-Sulawesi Tahun 2006-2014 di Universitas Komputer Indonesia. Peneliti meneliti tentang kerjasama Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam meningkatkan pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengawasan konservasi laut untuk pengelolaan spesies terancam punah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama membahas tentang kerjasama antara tiga Negara yang bersangkutan yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada perbedaan program kerjasama dan periode waktu kerjasama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul : **“Kerjasama Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina Melalui Program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi**

## **Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim Di Laut Sulu – Sulawesi Tahun 2016 – 2019”**

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa dari mata kuliah yang telah dipelajari di program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Komputer Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, mata kuliah ini membahas bagaimana Negara-negara yang tergabung didalam suatu kawasan khususnya di Asia Tenggara dalam menekankan bentuk hubungan kerjasama dari negara-negara yang berdekatan yang dilihat secara letak geografis. Wujudnya bisa dalam bentuk organisasi regional. Lebih lanjutnya, HI di Asia Tenggara lebih melihat pada proses-proses yang melatarbelakangi terbentuknya kerjasama atau hubungan yang terjadi di dalam kawasan tersebut. Latar belakang apa yang pada akhirnya menyatukan negara-negara dalam suatu wadah kerjasama regional di kawasan khususnya di Asia Tenggara.
2. Diplomasi dan Negoisasi, mata kuliah ini membahas tentang bagaimana interaksi Negara dalam mencapai tujuan kepentingan nasionalnya, yang dilakukan melalui cara-cara yang beragam seperti bagaimana bentuk diplomasinya, bagaimana teknik dalam melakukan diplomasi dan negoisasi, dan tentunya strategi dalam melakukan diplomasi dan negoisasi diantara aktor hubungan internasional.
3. Studi Keamanan Internasional, mata kuliah ini membahas tentang bagaimana aktor internasional dalam menjaga sebuah keamanan, maupun

itu di tingkat regional maupun internasional yang tentunya mengkaji sebuah konflik yang terjadi diantara aktor hubungan internasional. Keamanan internasional ini membahas juga tentang sebuah keamanan dari aktor internasional seperti Negara. Bagaimana sebuah sistem keamanan itu berjalan dan kaitan dengan penelitian ini adalah menyangkut tentang keamanan di antara Negara – Negara di kawasan regional atau perbatasan sebuah Negara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Rumusan Masalah Mayor**

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi. Adapun permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut: **“Bagaimana Kerjasama Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) Melalui Program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Dapat Meningkatkan Keamanan Maritim Di Laut Sulu – Sulawesi Pada Tahun 2016-2019? ”**

### **1.2.1 Rumusan Masalah Minor**

1. Apa saja program kerja Trilateral Maritim Patrol Indomalphi yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan maritim di laut sulu-sulawesi?
2. Kendala apa saja yang dialami dalam program kerjasama trilateral maritim patrol indomalphi?

3. Bagaimana Hasil kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam meningkatkan keamanan di laut sulu-sulawesi?

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Peneliti akan membatasi pembahasan masalah yaitu lebih menekankan pada bentuk kerjasama dalam menangani kasus perompak dan terorisme yang telah dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina terkait dengan tingkat keberhasilan kerjasama yang telah dilakukan. Peneliti juga akan membatasi tahun penelitian yaitu dari tahun 2016 sampai April 2019 guna mengetahui perkembangan dari kerjasama yang telah dilakukan pada periode tersebut.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam meningkatkan keamanan maritime di kawasan laut sulu-sulawesi.

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program kerja apa saja yang dilakukan dalam program trilateral maritim patrol indomalphi dalam meningkatkan keamanan maritime di laut sulu-sulawesi.



2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam program kerjasama trilateral maritim patrol indomalphi dalam meningkatkan keamanan maritim di laut sulu-sulawesi.
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil kerjasama dalam program kerjasama trilateral maritim patrol indomalphi dalam meningkatkan keamanan maritim di laut sulu-sulawesi.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai kejahatan transnasional dan kerjasama antar Negara dalam menangani suatu permasalahan, khususnya kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam meningkatkan keamanan di kawasan maritim khususnya di laut sulu-sulawesi.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Bagi lembaga akademik, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah informasi dan data-data di dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini seperti keamanan kawasan dan kejahatan transnasional. Bagi peneliti, manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah mengetahui tentang kejahatan transnasional yang bisa memberikan dampak yang buruk bagi sebuah Negara.